



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUYONO**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN**
3. NHK : **249645**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.975.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/87 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 342.900.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.400.000
2. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
4. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
5. MOBIL, SUZUKI CERRY ST 130 FUTURA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 28.350.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.031.097
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.383.281.097
III. HUTANG	Rp.	25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.358.281.097

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.